

**ALASAN JEPANG BELUM MERATIFIKASI  
BASEL BAN AMENDMENT (1993-2013)**

Oleh:

Irma Jelita (0801112973)\*

Email: irmajelitasatu@gmail.com

Pembimbing: Afrizal, S.IP, M.A

Bibliografi: 17 Buku, 12 Jurnal, 5 Dokumen, 16 Website.

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Prodi Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293  
Telp/Fax: 0761-63277

**Abstract**

*This research analyzes the reason of Japan has not ratify Basel Ban Amendment. Japan as a developed country has a high priority in environmental policy refused to ratify of Basel Ban Amendment. Its automatically inhibit the enactment of Basel Ban Amendment which aims to total ban on the transboundary movements of hazardous and toxic waste and other wastes that danger to human health and the environment. Japan has been a member of Basel Convention since 1993. But in reality until now Japan has remained in the position opposite party state conventions and the amendment has not been ratified. While on the other hand the Japanese continued to portray himself as pro-environment state.. Based on Porter-Brown theory, the role of actor in environments policy making, Japanese policy has not ratified the Basel Ban Amendment influenced by domestic economic interests and the influence of Japanese industrial groups in policy-making that related to the economic and industrial sectors. Japan have an interest to keep domestic economy stability after the economic bubble burst in 1993. Reduction amount of hazardous waste means reducing industrial production activity that sustain Japanese Economy. Japan also has an interest to externalization amount of waste. in addition to the economic benefits from waste trade in JEPAs, Japan also has interests to save the environment from the dangers of hazardous waste pollution. Moreover the role of industrial actor in environmental decision making also become one of causes why Japan has not ratify Basel Ban Amendment.*

*Keywords: Convention, Ratify, Amendment, Toxic and hazardous waste, National Interest.*

---

\* Mahasiswa jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau

## Pendahuluan

Jepang merupakan negara maju yang sektor ekonominya banyak didukung oleh bidang industri. Industri yang dimiliki yang dimiliki Jepang terutama dalam bidang otomotif, komputer, semi konduktor, elektronik, besi dan baja. Beberapa industri penting lainnya seperti petrokimia, farmasi, bioindustri, galangan kapal, dirgantara, tekstil dan makanan olahan mampu bersaing di pasar global. Pilihan pada sektor-sektor industri yang tepat memberikan sumbangan yang besar terhadap pertumbuhan ekonominya karena komoditi tersebut sangat dibutuhkan konsumen semua negara. Kemajuan industri dan tingkat produksi yang tinggi telah meningkatkan perekonomian Jepang secara drastis. Pada dekade 1980-an Jepang merupakan model keberhasilan ekonomi yang tidak tertandingi. Selama periode krisis dua krisis minyak tahun 1970-an dan 1980-an, Jepang tampil sebagai satu-satunya negara industri yang mengalami pemulihan ekonomi paling cepat dibanding AS dan Eropa.<sup>1</sup> Jepang mampu mengantungi surplus perdagangan terbesar diantara negara maju. Jepang juga menjadi pemimpin dalam persaingan teknologi dan ekonomi dengan negara-negara maju lainnya.

Sebagai negara maju Jepang merupakan salah satu negara yang memiliki kesadaran yang sangat tinggi akan ancaman kerusakan lingkungan. Hal ini dikarenakan industri berbasis teknologi tinggi yang dimilikinya. Industrialisasi disatu sisi membawa perkembangan teknologi yang luar biasa namun disisi lain terdapat ancaman

polusi dan bahaya limbah produksi. Limbah berbahaya dan beracun (B3) merupakan hasil sampingan industri yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan mencemari lingkungan. Jepang pernah mengalami pertambahan sampah yang sangat besar pasca Perang Dunia II. Saat itu pemerintah Jepang mengalami krisis tempat pembuangan sampah. Sehingga pada tahun 1957 Jepang menetapkan sebuah lokasi laut dangkal di Teluk Tokyo sebagai tempat pembuangan sampah yang diberi nama Yumenosima atau Dream Island. Dalam kurun waktu 10 tahun Dream Island telah sampai pada batas dayaampungnya dan menjadi sebuah pulau kecil yang terbuat dari sampah.<sup>2</sup>

Menurut laporan *The United Nations Environmental Programme* (UNEP) pada tahun 1980-1985 sekitar 3000-5000 juta ton limbah B3 yang dihasilkan setiap tahunnya oleh negara industri. Banyak negara-negara industri yang tidak mampu menampung limbah di dalam negerinya. Selain efek negatif yang ditimbulkan dan minimnya ketersediaan lahan, biaya pengolahan limbah B3 juga sangat tinggi. alasan tersebut mendorong negara-negara industri untuk mengirim limbah B3 ke negara-negara berkembang. Pembuangan limbah dalam beberapa dekade terakhir meningkat dengan drastis seiring dengan meningkatnya jumlah limbah yang dihasilkan oleh negara-negara yang mengalami industrialisasi. Awal tahun 1980an merupakan masa dimana terjadi peningkatan jumlah perpindahan limbah B3 lintas batas.

Kondisi ini menimbulkan kecemasan masyarakat dunia akan bahaya yang ditimbulkan oleh limbah B3 terhadap kesehatan manusia dan

---

<sup>1</sup> Nanang Parmuji mugasejati. Dimensi Politik Dalam Krisis Ekonomi Jepang. <junalsospol.fisipol.ugm.ac.id/index.php/jsp/article/view/121/118.>, [diakses pada 20 November 2013]

---

<sup>2</sup> Noriko Vitkev. *Garbage Disposal in Japan*, <<http://www.american.edu/TED/japangarbage.html>>, [diakses pada 30 Mei 2012]

lingkungan. Untuk menanggulangi masalah pembuangan limbah tersebut dibuat *The Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal* atau lebih sering disebut Konvensi Basel. Konvensi ini diprakarsai oleh *The United Nations Environmental Program* (UNEP) dan disetujui pada tanggal 22 Maret 1989 di Basel, Switzerland. Konvensi Basel merupakan perjanjian internasional pertama yang mengatur pergerakan limbah B3 dan limbah lainnya lintas batas. Konvensi ini mulai berlaku pada tanggal 5 Mei 1992 setelah diratifikasi oleh 20 negara. Hingga saat ini total negara yang sudah meratifikasi Konvensi Basel sebanyak 175 negara termasuk Uni Eropa dan negara OECD, kecuali Amerika Serikat.<sup>3</sup> Tujuan dari Konvensi Basel adalah untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari ancaman bahaya yang disebabkan oleh perpindahan limbah B3 dan limbah lainnya antar negara. Konvensi Basel memiliki tiga prinsip utama yaitu mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan hingga tingkat minimal, mempromosikan pengolahan limbah B3 yang ramah lingkungan/*environmentally sound management*, mengurangi jumlah perpindahan limbah B3 antar negara atau dibuang sedekat mungkin dengan sumber awal limbah tersebut. Dalam konvensi ini diatur bahwa perpindahan lintas batas limbah B3 dan limbah lainnya diperbolehkan namun untuk tujuan daur ulang dan dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan.

Kemudian pada *Third Conference of Parties* (COP 3) atau

---

<sup>3</sup> *Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal*, United Nations Audiovisual Library of International Law, <Legal.un.org/avl/pdf/ha/bcctmhd/bcctmhd\_ph\_e.pdf>, [diakses pada 15 Mei 2012]

sidang ketiga para pihak Konvensi Basel tahun 1995 dilakukan amandemen terhadap isi konvensi yang disebut dengan *Basel Ban Amendment*.<sup>4</sup> Amandemen Konvensi Basel ini berisi kewajiban memberlakukan larangan total terhadap segala bentuk pergerakan limbah B3 oleh negara-negara pihak konvensi. Jika sebelumnya negara-negara pihak Konvensi Basel masih diperbolehkan melakukan perpindahan limbah B3 lintas batas selama operasi tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam konvensi maka dalam amandemen ini dilakukan larangan total terhadap setiap perpindahan limbah B3 lintas batas. Namun tidak semua negara pihak konvensi yang menyetujui isi amandemen, terutama negara industri yang memiliki kepentingan untuk melakukan pengiriman limbah B3 ke negara lain. Negara-negara yang tidak menyetujui tersebut menolak untuk meratifikasi amandemen Konvensi Basel termasuk Jepang. Jepang sebagai salah satu negara industri dan pihak Konvensi Basel secara unilateral memilih untuk tidak meratifikasi amandemen Konvensi Basel.

Melalui nota yang dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri Taro Aso, Jepang menyatakan masih tetap memegang komitmen sebagai negara pihak Konvensi Basel dan berjanji untuk tidak melakukan pembuangan limbah B3 dan limbah lainnya ke negara lain. Namun dalam prakteknya Jepang justru melakukan tindakan yang bertolak belakang dengan pernyataan tersebut. Pada tanggal 12 Januari 2000 *Basel Action Network* (BAN) menemukan sejumlah limbah B3 asal Jepang di Philipina. Perusahaan Nisso Ltd. Tochigi, sebuah perusahaan milik Jepang yang bergerak di bidang pembuangan sampah industri

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

membongkar 122 kontainer yang berisi 2700 metric ton limbah berbahaya rumah sakit di Philipina.<sup>5</sup> Kontainer-kontainer yang diekspor secara ilegal tersebut disamakan sebagai daur ulang limbah kertas. Namun setelah dilakukan pemeriksaan pemerintah Philipina menemukan beberapa jenis limbah medis seperti jarum suntik, pipa karet medis, kapas pembersih bekas, alat-alat suntik dan pembalut bekas serta berbagai limbah listrik yang berbahaya terhadap kesehatan. Dalam dokumen yang menyertai kontainer-kontainer tersebut tidak ditemukan alamat yang jelas.

Berdasarkan laporan Pollution Control Department pada tahun 2004, dari 1.405 juta ton limbah berbahaya dari sektor industri Jepang yang dibuang hanya 50% yang diolah dalam negeri. Sekitar 0,403 juta ton limbah berbahaya yang dihasilkan tidak diolah dengan sewajarnya dan diekspor dari Jepang ke Thailand.<sup>6</sup> Selain itu Jepang juga melakukan perdagangan limbah ke negara-negara yang terlibat dalam kerjasama ekonomi bilateral dengan Jepang/*Japan Economic Partnership Agreements* (JEPAs) antara lain dengan Malaysia, Brunei, Indonesia, Thailand, Philipina dan Vietnam. Dalam perjanjian tersebut Jepang memasukkan beberapa jenis limbah berbahaya kedalam daftar barang-barang yang mendapat tarif rendah dan tidak dikenakan pajak seperti abu dan residu incenerator dan limbah endapan lumpur. Program JEPAs Jepang ini mendapat

---

<sup>5</sup> *Nisso license revoked for dumping*, <<http://www.japantimes.co.jp/news/2000/03/30/business/nisso-license-revoked-for-dumping/#.Uj7MOX96888>>, [diakses tanggal 30 Mei 2012]

<sup>6</sup> *Greenpeace Blasts Japanese Gov't over Hazardous Waste Exports to Thailand*, <<http://www.greenpeace.org/seasia/ph/News-stories/greenpeace-blasts-japanese-gov/>>, [diakses tanggal 30 Mei 2012]

berbagai protes dari negara-negara pihak Konvensi Basel karena dianggap berseberangan dengan isi dan tujuan dari Konvensi Basel.

### **Hasil dan Pembahasan**

Menurut Porter dan Brown dalam bukunya *Global Environmental Politics* terdapat peran aktor HI dalam politik lingkungan global. Aktor-aktor yang dimaksud adalah negara, *Non Governmental Organization* (NGO) lingkungan, organisasi internasional dan rezim lingkungan dan sektor industri. Peran tiap-tiap aktor tersebut dapat dikelompokkan dalam dua kategori yaitu peran aktor dalam pembentukan rezim lingkungan dan peran aktor dalam pembentukan kebijakan lingkungan suatu negara. Maka dalam hal ini penulis menggunakan peran kategori kedua: peran aktor dalam pembentukan kebijakan lingkungan suatu negara untuk menjelaskan alasan Jepang belum meratifikasi amandemen Konvensi Basel.

Menurut Porter dan Brown, pembahasan pada level negara terdapat empat peran atau posisi sebuah negara dalam kerjasama bidang lingkungan, yaitu:<sup>7</sup>

1. *Lead State*. Yaitu negara yang memiliki komitmen kuat dalam aksi internasional terhadap isu, terdepan dalam negosiasi dengan mengajukan formula sendiri serta berusaha meraih dukungan dari negara lain.
2. *Supporting State*. Yaitu negara yang memiliki komitmen dan pendukung inisiatif aksi internasional

---

<sup>7</sup> *Garet Porter dan Janet Brown, Global Environmental Politics 2nd edition*, (Boulder:Westview press, 1996), hal 20

namun tidak pada posisi sekuat *lead state*.

3. *Swing State*. Yaitu negara yang tidak memiliki kepentingan terhadap isu sehingga perlu adanya “penawaran” yang mampu menarik minatnya untuk terlibat dalam kerja sama lingkungan.
4. *Veto State*. Yaitu negara yang menentang rezim lingkungan melalui ketidaksetujuan dalam negosiasi atau dengan tidak mengimplementasikan kebijakan rezim.

Dari empat peran negara dalam kerjasama bidang lingkungan yang dijelaskan diatas maka penulis mengasumsikan posisi Jepang merupakan *supporting state* dalam Konvensi Basel karena Jepang telah menjadi peserta Konvensi Basel sejak tahun 1993. Ini berarti bahwa Jepang menyatakan komitmen terhadap isi Konvensi Basel. Jepang mendukung isi konvensi mengenai adanya kontrol terhadap perpindahan limbah B3 dan limbah lainnya lintas batas. Namun Jepang merupakan *veto state* terhadap amandemen Konvensi Basel. Jepang menolak untuk meratifikasi dan mengimplementasikan pelarangan total perpindahan limbah B3 lintas negara seperti yang diatur dalam amandemen Konvensi Basel.

Negara sebagai aktor dalam dalam menentukan kepentingan dan membentuk kebijakan yang berhubungan dengan lingkungan mempertimbangkan faktor-faktor berikut<sup>8</sup>:

1. Peran negara dari sudut pandang domestik:
  - Kepentingan politik

- Kepentingan ekonomi domestik
  - Eksistensi gerakan lingkungan lokal
2. Peran negara dari sudut pandang internasional
    - Derajat *cost and risk* isu terhadap vunerabilitas kondisi lingkungan
    - Derajat *cost and benefit* bergabungnya negara dalam rezim
  3. Peran Organisasi Internasional diluar konteks rezim internasional
    - Bantuan pendanaan dan asistensi teknologi
    - Hasil riset yang bertujuan mempersuasi negara untuk mengadopsi kebijakan tertentu
    - Tekanan normatif terhadap negara berkaitan dengan isu kebijakan pembangunan berkelanjutan
  4. Peran NGO, yang lebih fokus paada pengaruhnya terhadap rezim bukan kepada pembentukan kebijakan negara
  5. Peran industri, yang menggunakan pengaruh ekonomi dan politiknya untuk melindungi mereka agar tetap mampu melakukan aktivitas ekonomi yang membayakan lingkungan

Menurut Porter dan Brown, jika dilihat dari sudut pandang domestik pembentukan kepentingan dan pemilihan posisi negara dalam suatu isu lingkungan global sangat bergantung pada kepentingan politik, kekuatan ekonomi domestik, serta dipengaruhi juga oleh faktor ideologi meskipun

<sup>8</sup> *Ibid.* Hal 38

ideologi tidak selalu terlihat dalam pengambilan kebijakan untuk isu lingkungan. Kekuatan dan pengaruh dari kekuatan ekonomi, politik dan konstituen lingkungan domestik mempengaruhi kepentingan negara. Peran NGO sebagai organisasi nonprofit yang tidak terikat dengan pemerintah negara manapun atau organisasi berorientasi profit. Porter dan Brown melihat adanya tiga bentuk NGO di negara industri. Pertama NGO yang terkait dengan INGO yang memiliki cabang diberbagai negara, kedua NGO nasional yang fokus pada isu domestik, dan ketiga institusi *think tanks* yang pengaruhnya lebih berupa hasil riset dan studi. Ketiganya mlingkunganemeiliki arah pengaruh yang berbeda. Untuk sektor industri, Porter dan Brown menyatakan bahwa dibandingkan aktor lain, industri lebih terpengaruh secara langsung oleh kebijakan lingkungan baik internasional maupun domestik. Oleh karena itu sektor industri berusaha untuk memaksimalkan usaha mereka baik melalui lobi politik maupun tekanan ekonomi agar kebijakan lingkungan tertentu tidak mengurangi profit yang mereka dapatkan.

Dari berbagai faktor yang dijabarkan oleh Porter dan Brown, penulis mengambil faktor domestik dan faktor industri dalam menjawab pertanyaan penelitian. Mengingat fokus penelitian ini adalah pembentukan kebijakan maka penulis tidak memasukkan faktor sudut pandang internasional, peran organisasi internasional dan peran NGO karena menurut Porter dan Brown ketiga faktor tersebut lebih mengindikasikan keterlibatan negara dalam rezim lingkungan. Dalam hal ini Jepang sebagai negara veto terhadap amandemen Konvensi Basel secara otomatis tidak menerima amandemen Konvensi Basel dan tidak terlibat dalam

setiap kebijakan yang berkaitan dengan isi amandemen dan upaya untuk memberlakukan amandemen.

### **Kepentingan Ekonomi Jepang**

Memasuki awal dekade 1990-an, Jepang mengalami kemerosotan ekonomi yang serius ditandai dengan ambruknya *bubble economy* (gelembung ekonomi) yang mengantar Jepang memasuki masa krisis ekonomi yang berkepanjangan. Jatuhnya sistem perbankan dan finansial membuat satu persatu perusahaan keuangan dan bank di Jepang bangkrut, tingkat kredit macet, tingkat pengangguran semakin tinggi dan mencapai 4,8 persen pada awal tahun 1999, yang kemudian dilanjutkan dengan gelombang akuisisi oleh modal asing terhadap banyak perusahaan finansial Jepang. Seluruh kondisi tersebut membuat model pembangunan ekonomi Jepang yang disanjung selama ini dipertanyakan kembali formulanya ketika Jepang tidak juga dapat seutuhnya keluar dari krisis. Jepang mengalami krisis ekonomi yang cukup lama sepanjang sejarahnya.<sup>9</sup>

Periode dari tahun 1992 sampai sekarang pertumbuhan ekonomi Jepang hanya meningkat sekitar 2% saja dan jumlah pengangguran meningkat dari 5% menjadi 10%. Hal ini disebabkan oleh jatuhnya "*buble economic*" atau ekonomi gelembung pada awal 1990-an. Ekonomi Jepang memasuki periode deflasi, resesi panjang dan terjadi gelombang akuisisi oleh modal asing terhadap banyak perusahaan finansial Jepang. Untuk pertama kalinya dalam sejarah ekonomi Jepang, krisis ekonomi bisa berlansung sampai 8 tahun tanpa penyelesaian.

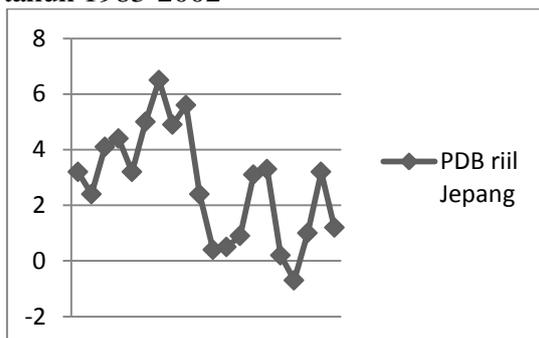
Jepang mengalami gelembung ekonomi yang ditandai dengan tingginya harga aset, tingkat harga dan

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

pertumbuhan kredit yang cepat. Pada akhir tahun 1989 harga saham mencapai tingkatan tertinggi, tetapi dalam waktu singkat yaitu setahun kemudian, turun secara drastis mencapai angka 40 persen hingga tahun-tahun berikutnya. Harga saham turun dari 24000 yen pada bulan Desember 1990, menjadi hanya 14000 yen pada pertengahan bulan Agustus 1992. Kapitalisasi pasar saham turun drastis sebesar lebih dari 300 triliun yen, dari 590 triliun yen pada akhir tahun 1989 menjadi hampir 260 triliun yen pada bulan Juli 1992. Penurunan harga yang merosot tajam tidak hanya pada saham tetapi juga pada sektor real estate.<sup>10</sup>

Grafik 1. Pertumbuhan PDB riil Jepang tahun 1983-2002



Sumber: <[http://daigakuin.soka.ac.jp/assets/files/pdf/major/kiyou/16\\_keizai3.pdf](http://daigakuin.soka.ac.jp/assets/files/pdf/major/kiyou/16_keizai3.pdf)>, [diakses pada 13 Desember 2013]

Seperti yang dapat dilihat dari grafik 2, Jepang mencapai PDB riil tertinggi hingga 6,4 persen pada tahun 1981. Tahun 1985 hingga 1991 terjadi gelembung ekonomi yang menunjukkan ekspektasi pertumbuhan yang tinggi. Kemudian pada tahun 1991 terjadi penurunan drastis pada tingkat pertumbuhan PDB dari 5,6 persen menjadi 2,4 persen dan 0,5 persen pada tahun berikutnya, dan mencapai titik

<sup>10</sup> *ibid*

terendah -0,7 pada tahun 1999.<sup>11</sup> Dalam perkembangannya, penurunan rata-rata pertumbuhan ekonomi ini bahkan terus berlanjut hingga 10 tahun lamanya. Jepang mengalami stagnansi ekonomi yang berlangsung sejak tahun 1990-2010.<sup>12</sup> Secara umum, grafik di bawah ini menggambarkan kondisi PDB Jepang selama masa stagnansi ekonomi.

Grafik2. Stagnansi ekonomi Jepang



Sumber: *Tokyo Takes from Japan Investor*, <<http://www.japaninvestor.net/2011/01/japan-nominal-gdp-growth-in-2011-big.html>> [diakses pada 9 Juni 2013]

Dari grafik 3 diatas dapat terlihat PDB Jepang hanya mengalami fluktuasi sejak tahun 1990an. Perekonomian stagnan pada periode 1991 hingga 2010 dengan pertumbuhan ekonomi dibawah 1,2%.<sup>13</sup> Institusi keuangan menanggung kredit

<sup>11</sup> Haruka Araki, *The Causes of the Japanese Lost Decade: An Extension of Graduate Thesis*, <[http://daigakuin.soka.ac.jp/assets/files/pdf/major/kiyou/16\\_keizai3.pdf](http://daigakuin.soka.ac.jp/assets/files/pdf/major/kiyou/16_keizai3.pdf)>, [diakses pada 13 Desember 2013]

<sup>12</sup> Nobuhide Hatasa, "Japan's Stagnant Economy: Ways to Move Ahead" <[www.mercury.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/...3830.../Ch\\_1\\_Hatasa.pdf](http://www.mercury.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/...3830.../Ch_1_Hatasa.pdf)> [diakses pada tanggal 26 Mei 2013]

<sup>13</sup> *Tokyo Takes from Japan Investor*, <<http://www.japaninvestor.net/2011/01/japan-nominal-gdp-growth-in-2011-big.html>> [diakses pada 9 Juni 2013]

bermasalah karena telah mengeluarkan pinjaman uang dengan jaminan tanah atau saham. Runtuhnya ekonomi gelembung telah memberikan tekanan yang kuat terhadap perekonomian nasional Jepang karena sektor jasa menyumbang tiga perempat dari total penghasilan PDB Jepang. Industri utama sektor jasa di Jepang berupa bank, asuransi, real estat, transportasi, dan telekomunikasi. Keuntungan-keuntungan yang diperoleh pada masa gelembung ekonomi tidak dapat menutupi kerugian ketika gelembung ekonomi runtuh. Usaha pemerintah mengembalikan pertumbuhan ekonomi tidak memperlihatkan cukup hasil karena terhambat oleh kelesuan ekonomi global pada tahun 2000.

Stagnansi ekonomi dalam negeri menuntut Jepang untuk cermat dalam setiap pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan ekonomi. Jepang cenderung konservatif terhadap isu-isu yang berhubungan dengan ekonomi. Isu lingkungan merupakan isu yang tidak terlepas dari masalah ekonomi. Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa amandemen Konvensi Basel mewajibkan setiap negara pihak konvensi untuk melakukan pelarangan total perpindahan limbah B3 lintas batas negara selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 1997. Limbah B3 yang dilarang menurut konvensi Basel merupakan limbah yang sebagian besar dihasilkan dari proses industri. Keputusan meratifikasi amandemen Konvensi Basel menghadapkan Jepang pada pilihan untuk mengurangi tingkat produksi industri karena wilayah Jepang tidak memadai untuk menampung limbah yang dihasilkan di dalam negerinya. Tingkat produksi berbanding lurus dengan jumlah limbah yang dihasilkan. Pengurangan jumlah limbah berarti pengurangan tingkat produksi industri. Hal ini dianggap dapat semakin

memperburuk ekonomi Jepang karena sektor industri merupakan penyumbang PDB terbesar selain sektor jasa. Kebijakan untuk meratifikasi amandemen Konvensi Basel bukan keputusan yang bijak menurut perspektif Jepang. Jepang yang tengah mengalami kelesuan ekonomi pada periode 1990-an mengupayakan pemulihan terhadap kondisi ekonomi dalam negerinya. Meratifikasi amandemen Konvensi Basel dianggap dapat menghambat upaya pemulihan ekonomi Jepang.

Tidak lama setelah runtuhnya ekonomi gelembung tahun 1991 dan krisis keuangan menerjang Asia Tenggara di tahun 2002 Jepang mulai mengadakan kesepakatan pembentukan *Economic Partnership Agreement* (EPA). *Japan Economic Partnership Agreement* atau JEPA adalah kerangka kerjasama ekonomi yang mencakup dua isu utama yaitu: pertama isu tradisional dalam *free trade area* (FTA), liberalisasi perdagangan atas produk barang dan jasa. Kedua Isu barang, yang mencakup kerjasama dalam berbagai bidang. Kebijakan dasar JEPA dikeluarkan pada tanggal 21 Desember 2004 setelah disetujui oleh Dewan Menteri untuk promosi kemitraan ekonomi pada tanggal 21 Desember 2004.

Dalam *White Paper on International Trade* pada tahun 2001, JEPA digambarkan sebagai kesepakatan perdagangan yang melampaui batas-batas tarif dalam FTA dengan menjangkau area-area seperti investasi, kompetisi, digitalisasi prosedur perdagangan dan harmonisasi sistem serta memfasilitasi pergerakan orang per orang.<sup>14</sup> Kerja sama JEPA dilandasi

---

<sup>14</sup> METI, *White Paper on International Trade: Challenge of the Foreign Economic Policy in the 21st Century*, <<http://www.meti.go.jp/english/report/download>

tiga hal, yaitu liberalisation (pembukaan akses pasar terbuka), facilitation (kemudahan akses pasar), dan cooperation (kerja sama untuk peningkatan kapasitas).

Perjanjian kerjasama ekonomi pertama sukses dilakukan Jepang dengan Singapura (*Japan-Singapore Economic Partnership Agreement/JSEPA*) pada tahun 2002. JEPA pertama dibuat pada tahun 2002 dengan salah satu negara di kawasan regional Asia, yaitu Singapura. Hingga September tahun 2007 Jepang sudah mengantongi kesepakatan JEPA dengan delapan negara, di mana enam diantaranya adalah negara ASEAN. Enam negara ASEAN tersebut adalah Singapura (2002), Thailand bergabung pada (2003), kemudian disusul dengan Malaysia (2005), Filipina (2006) dan Brunei Darussalam (Juni 2007), dan terakhir dengan Indonesia pada Agustus (2007).

Selain dengan negara/kawasan di Asia, Jepang juga mulai memperluas pembentukan JEPA dengan beberapa negara/kawasan lainnya di luar regional Asia seperti EPA Jepang-Switzerland, EPA Jepang-Meksiko, maupun EPA Jepang-Chili. Bahkan saat ini Jepang berencana memperluas jangkauan kemitraannya hingga Timur Tengah dan Pasifik. Pada April 2008 Jepang menyepakati *Japan-ASEAN Comprehensive Economic Partnership Agreement (JACEP)* dengan negara-negara anggota ASEAN.

JEPA memiliki kaitan yang sangat kuat dengan aktifitas perdagangan Jepang di Asia. Keuntungan perdagangan Jepang bertahan pada produk-produk intermediet seperti mesin dan peralatan logam, komponen elektronik, besi dan

baja, logam dan non logam dan komponen otomotif.<sup>15</sup> Melalui JEPA Jepang berhasil memenuhi kepentingannya yaitu memperbesar dan memperkuat industri manufaktur yang umumnya berbasis di negara-negara Asia Tenggara.

Perdagangan dalam JEPA terbukti cukup membantu pemulihan ekonomi Jepang. Sebagai contoh dalam IJEPA atau kesepakatan perdagangan Jepang dengan Indonesia yang disepakati tahun 2007. Pada tahun 2010 nilai perdagangan kedua negara secara keseluruhan telah mencapai angka US\$ 42,3 miliar. Nilai total perdagangan tersebut merupakan kenaikan sebesar 45,6% dibanding total perdagangan pada tahun 2009 sebesar US\$ 29 miliar. Sementara itu pada periode Januari-Oktober 2011, total perdagangan kedua negara telah berjumlah US\$ 43,8 miliar atau naik 27% dibanding periode yang sama pada tahun 2010 sebesar US\$ 34,4 miliar. Nilai total perdagangan antar kedua negara menunjukkan kecenderungan positif, di mana rata-rata pertumbuhannya selama lima tahun terakhir (2006-2010) tercatat sebesar 8,4%.<sup>16</sup> Pada Juli 2010-Juni 2011 setelah berlaku skema tarif IJEPA total nilai ekspor aktual Jepang ke Indonesia adalah US\$ 17,982,250,000. Dampak yang diberikan dengan adanya skema tarif dalam IJEPA bagi ekspor Jepang ke Indonesia adalah meningkatnya total nilai ekspor Jepang ke Indonesia rata-

---

files/gWP0140e.pdf>, [diakses pada 23 Juni 2013]

---

<sup>15</sup> METI, *White Paper in International Trade 2003*, h. 147-150, <<http://www.meti.go.jp/english/report/download/files/gIT0342e.pdf>>, [diakses pada 23 April 2013]

<sup>16</sup>Sigit Setiawan, *Analisis Dampak IJEPA Terhadap Indonesia Dan Jepang*, <[http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/2014\\_kajian\\_pkrb\\_03.%20Dampak%20IJEPA.pdf](http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/2014_kajian_pkrb_03.%20Dampak%20IJEPA.pdf)>, [diakses pada 10 Juni 2014].

rata sebesar US\$ 93,490,000 per tahunnya.<sup>17</sup>

Kepentingan ekonomi Jepang dalam JEPA juga diiringi dengan keuntungan lain berupa pembuangan limbah secara legal karena dalam beberapa daftar barang yang bebas pajak dan tarif dimasukkan beberapa jenis limbah hasil produksi. Limbah tersebut dikatakan Jepang sebagai limbah yang dapat didaur ulang. Akan tetapi sebenarnya limbah produksi tersebut tergolong kedalam limbah berbahaya dan beracun yang dilarang dalam Konvensi Basel seperti limbah baterai, limbah farmasi, limbah kimia dan sebagainya. Limbah yang sebenarnya menjadi masalah didalam negeri Jepang bisa menjadi komoditi yang diperdagangkan dan membantu pemulihan ekonomi Jepang setelah mengalami stagnansi ekonomi selama 10 tahun.

Keuntungan ganda yang didapat Jepang dalam JEPA tersebut bisa dipastikan akan hilang jika Jepang menandatangani amandemen Konvensi Basel. Pelarangan total pengiriman limbah yang tergolong limbah B3 dalam Konvensi Basel jelas menghambat perdagangan dalam JEPA karena beberapa komoditi yang termasuk dalam jenis barang yang bebas hambatan adalah limbah B3. Apabila Jepang menandatangani amandemen Konvensi Basel secara otomatis Jepang harus menghentikan perdagangan limbah B3 yang terdapat dalam JEPA. Keputusan tersebut sangat tidak strategis bagi Jepang yang sedang berupaya memulihkan kembali ekonomi domestiknya pasca krisis.

### **Keterbatasan Wilayah Jepang Menampung Limbah dalam Negerinya**

Perkembangan sektor industri yang pesat secara signifikan memberikan dampak nyata pada pertumbuhan ekonomi Jepang. Namun industrialisasi memiliki dampak negatif berupa limbah produksi dan berbagai resikonya. Limbah merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh berbagai fase dari aktifitas manusia dimana komposisi dan besar jumlahnya tergantung pada tingkat konsumsi dan struktur industri dan ekonomi. Tahun 1994 total jumlah limbah Jepang sekitar 400 juta ton dimana 80-90% dari jumlah limbah tersebut merupakan limbah industri.<sup>18</sup>

Limbah yang dihasilkan oleh Jepang mengalami peningkatan setiap tahun, baik limbah industri maupun limbah non-industri. Peningkatan jumlah limbah menjadi masalah baru yang tak bisa dielakkan oleh Jepang. Ini disebabkan oleh tingginya tingkat kehidupan, daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat Jepang serta semakin tingginya proses produksi yang dilakukan oleh industri-industri di dalam negeri. Menurut data dari Bank Dunia produksi limbah di kota-kota besar Jepang lebih dari 1kg/kapita/hari. Jumlah tersebut dapat dikatakan sangat besar jika dibandingkan dengan negara lain di Asia yang rata-rata sampahnya tidak sampai 1 kg/kapita/hari. Disatu sisi begitu produktif dan tingginya perekonomian di Jepang, terbukti dengan tingginya tingkat konsumsi masyarakat kota di Jepang. Namun disisi lain Jepang sesungguhnya menghadapi suatu gejolak dan

---

<sup>17</sup> *ibid*

---

<sup>18</sup> Fumikazu Yoshida, *The Political Economy of Waste Management in Japan*, Economic Journal of Hokkaido University 1999. <[http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/30573/1/28\\_P1-27.pdf](http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/30573/1/28_P1-27.pdf)>, [diakses pada 09 Januari 2014]

tantangan besar dalam menangani masalah limbah agar limbah-limbah tersebut dapat dikurangi secara signifikan.

Hampir 126 juta orang hidup di Jepang, negara yang memiliki luas tanah 145.900 mil<sup>2</sup> ini diperkirakan menghasilkan sampah kota sekitar 50 juta ton setiap tahunnya. Pada tahun 1995, jumlah limbah rumah tangga yang dihasilkan diseluruh Jepang diperkirakan bernilai 50,7 juta ton, jumlah itu belum termasuk 2,4 juta ton sampah yang didaur ulang. Jumlah total keseluruhan limbah jika ditambahkan dengan limbah industri mencapai 400 juta ton.<sup>19</sup>

Program daur ulang limbah yang diterapkan pemerintah Jepang tidak cukup efektif sebagai upaya untuk menangani masalah limbah. Ini dikarenakan limbah yang didaur ulang sebagian besar adalah limbah rumah tangga. Sementara itu hanya sebagian kecil limbah industri yang bisa ditangani secara tepat di dalam negeri Jepang. Wilayah negara Jepang yang kecil tidak mampu menampung besarnya jumlah limbah yang dihasilkan. Jepang tidak memiliki pilihan selain melakukan eksternalisasi terhadap limbah-limbah tersebut. Karena apabila jika dibiarkan di wilayah Jepang membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

### **Peran Aktor Industri Dalam Pengambilan Kebijakan di Jepang**

Jepang merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional dengan sistem pemerintahan parlementer dua kamar. Di Jepang terdapat enam partai besar, yaitu *Liberal Democratic Party* (LDP), *The Japan Socialist Party*, *The*

*Komneito*, *The Democratic Socialist Party*, *The Japan Communist Party*, dan *The United Social Democratic Party*.<sup>20</sup> Selain partai politik kehidupan politik di Jepang juga diwarnai dengan adanya kelompok-kelompok kepentingan. Golongan kepentingan di Jepang, antara lain ialah kelompok perusahaan-perusahaan besar Jepang atau kelompok *Big Business*. Di samping itu terdapat pula organisasi perusahaan swasta, Keiretsuka yaitu perusahaan yang mempunyai anak-anak perusahaan pembuat komponen misalnya Mitsui group atau Mitshubishi group. Kedua kelompok ini dapat dikategorikan sebagai kelompok kepentingan yang mempunyai pengaruh dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan bisnis dan industri Jepang.

Dalam proses pembuatan kebijakan di Jepang terdapat hubungan yang erat antara politisi, birokrasi dan pengusaha. Sinegri ketiga aktor ini sering disebut sebagai *iron triangle* atau sering juga disebut dengan "*Japan Inc*". Prinsip dasar dari *iron triangle* ini adalah bantuan dan perlindungan serta promosi bagi kelompok pengusaha atau bisnis Jepang oleh birokrat dan politisi. Hubungan ini terbentuk dalam kerangka kerjasama dimana birokrasi/pemerintah berusaha mendorong bisnis agar dapat berkompetisi di dunia internasional. Pengusaha dengan birokrat yaitu pengusaha melakukan amakudari ke birokrat dan birokrat memberikan dukungan untuk pebisnis dengan *administrative guidance*. Kontrol pemerintah yang dilakukan melalui *Japan's Ministry of Trade and Industry* (MITI) mengontrol pertukaran luar negeri dan perijinan teknologi asing. MITI bersama dengan kementerian

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Haruhiro Fukui, *Japan's Government*, Encyclopedia Americana, (Connecticut:Scholastic Library publishing, Inc,2004). hal 91-93

lainnya memberikan panduan administratif bagi perusahaan agar dapat melakukan aktivitas dengan garis yang paling produktif.

Hubungan antara pengusaha dengan politisi adalah memberikan *political contribution* dan politisi membuat kebijakan yang mendukung pengusaha. LDP merupakan partai yang banyak beranggotakan pengusaha, memunculkan adanya anggapan bahwa para pengusaha sangat berperan dalam menentukan kebijakan. Walaupun secara struktur partai hanya merupakan komponen infrastruktur dalam kancan politik sebuah negara namun para pengusaha yang tergabung dalam LDP dapat memanfaatkan LDP sebagai salah satu sarana untuk ikut campur dalam pembuatan kebijakan. Faktanya banyak perdana menteri Jepang yang merupakan seorang pengusaha sekaligus politikus. Sebagai contoh Takafumi Horie, seorang pengusaha besar perusahaan yang bergerak dibidang internet dan multimedia merupakan salah satu anggota LDP. Hal ini bisa menjadi cerminan eratnya hubungan antara pebisnis dan pemerintah Jepang.

Pola hubungan *iron triangle* antara pelaku bisnis dan industri, birokrat dan politisi dalam politik Jepang telah mengubah arah kebijakan Jepang. Kebijakan yang diambil pemerintah adalah kebijakan yang pro-ekonomi dan pro-industri, artinya setiap kebijakan yang diambil cenderung mengedepankan kepentingan industri. Melalui pola hubungan *iron triangle*, kelompok pengusaha dan industri berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah melalui LDP. LDP adalah partai mendukung kebijakan kompetisi pasar bebas dengan tujuan seperti ekonomi berbasis ekspor yang cepat, peran yang lebih positif dan aktif dikawasan Asia pasifik,

internasionalisasi ekonomi Jepang melalui liberalisasi dan mempromosikan permintaan dalam negeri serta promosi penelitian ilmiah. Larangan total pengiriman dan pembuangan limbah lintas batas yang diatur dalam *Basel Ban Amendment* dianggap sangat bertabrakan dengan kepentingan kelompok pengusaha dan industri yang melakukan ekspor limbah ke luar negeri. Ini dikarenakan pilihan mengolah limbah sendiri didalam negeri membutuhkan biaya yang sangat besar. Biaya pengolahan limbah berkisar antara US\$ 5.000 sampai US\$ 10.000 per ton. Hal ini sangat mahal jika dibandingkan dengan ongkos untuk membuang limbah yang hanya US\$ 50 sampai US\$ 100 per ton.<sup>21</sup> Dalam hal ini kebijakan Jepang untuk tidak meratifikasi *Basel Ban Amendment* dipengaruhi kuat oleh kepentingan pengusaha dan industri. Apabila Jepang meratifikasi *Basel Ban Amendment* maka kelompok pengusaha dan industri harus mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk pengolahan limbahnya. Hal tersebut jelas akan menambah beban biaya produksi perusahaan untuk pengolahan limbah karena selain itu hanya terdapat pilihan lain berupa pengurangan produksi.

## Simpulan

Alasan Jepang belum meratifikasi amandemen Konvensi Basel tidak terlepas dari faktor kepentingan ekonomi. Sejalan dengan pemikiran Potter-Brown tentang alasan suatu negara memutuskan menjadi

---

<sup>21</sup> *Kejahatan Ekonomi Dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Serta Pengaruhnya Terhadap Pelestarian Lingkungan Hidup*, <[http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/09109132\\_2086-5449.pdf](http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/09109132_2086-5449.pdf)>, [diakses tanggal 28 Maret 2012]

negara veto atau penentang sebuah perjanjian internasional, kepentingan ekonomi domestik menjadi alasan kuat bagi Jepang untuk menunda meratifikasi amandemen Konvensi Basel tersebut. Pasca runtuhnya “*economic bubble*” pada awal 1990-an, semua kebijakan Jepang diarahkan pada upaya pemulihan ekonomi dalam negerinya. Jepang mempunyai kepentingan dalam mempertahankan perdagangan limbah B3-nya yang terdapat dalam *Japan Economic Partnership Agreement / JEPA* dengan beberapa negara lain.

Jepang juga memiliki alasan yang kompleks untuk menjaga wilayah dalam negerinya dari bahaya polusi limbah B3. Berbagai bencana yang pernah dialami Jepang akibat pencemaran limbah B3 seperti *Minamata mercury disaster* merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi Jepang karena telah menelan banyak korban jiwa. Kondisi ini menuntut Jepang untuk lebih memfokuskan perhatian pada masalah penanganan limbah dalam negerinya. Wilayah Jepang tidak cukup untuk menampung seluruh limbah yang dihasilkan didalam negerinya. Sementara limbah B3 memerlukan manajemen pembuangan yang berkelanjutan. Lebih jauh, alasan belum diratifikasinya amandemen Konvensi Basel oleh Jepang tidak terlepas dari besarnya pengaruh aktor bisnis dan industri dalam proses pengambilan kebijakan di Jepang. Kelompok industri menggunakan pengaruh ekonomi dan politiknya untuk melindungi mereka agar tetap bisa melanjutkan aktivitas ekonomi yang dapat berdampak buruk pada lingkungan.

#### Daftar Pustaka

Coplin, William D. 1980. *Introduction to International Politics*. New Jersey: Prentice Hall Inc.

Craswell, John C. 1994. *Research Design Qualitative And Quantitative Approaches*. India: Sage Publication

Eiji, Oguma. 2008. *Contemporary Japan From The Perspective of Post-War Japanese History*. Universitas Keio: Japan.

Holsti, KJ. *Politik Internasional, Suatu Kerangka Analisis*. Bandung: Bina Cipta

Irsan, Abdul. 2001. *Budaya dan Perilaku Politik Jepang di Asia*. Jakarta: Grafindo

Mas'ood, Mohtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia

Pathiana, Wayan. 2002. *Hukum Perjanjian Internasional Bagian I*. Bandung: Mandar Maju.

Porter, Garet, Janet, Brown, *Global Environmental Politics 2nd edition*, (Boulder: Westview press, 1996), hal 20

Raourke, John T. 2001. *International Politic on The World Stage*. USA: University of Connecticut

Andrew Webster-Main. *Keeping Africa Out of The Global Backyard: A Comparative Study of The Basel and Bamako Convention*, <<http://www.environmentalexpert.com/Files%5C6063%5Carticles%5C9017%5C1.pdf>>, [diakses tanggal 28 Mei 2012].

*Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal*, United Nations Audiovisual Library of International Law, <[Legal.un.org/avl/pdf/ha/bcctmhw/bcctmhw\\_d\\_ph\\_e.pdf](http://Legal.un.org/avl/pdf/ha/bcctmhw/bcctmhw_d_ph_e.pdf)>, [diakses pada 15 Mei 2012]

*Basel Convention: Protocol On Liability And Compensation For Damage*

- Resulting From Transboundary Movements Of Hazardous Wastes And Their Disposal*, <<http://www.basel.int/portals/4/basel%20convention/docs/text/baselconvention-text-e.pdf>>, [diakses tanggal 16 Mei 2013].
- Basel Convention Ban Amendment- Entry into Force Country Analysis*, <<http://archive.basel.int/convention/cli/wildhausmeeting/TBM%20Analysis%20in%20Asia.pdf>>, [diakses tanggal 1 Mei 2012].
- Digital Dump: Exporting Re-use and Abuse to Africa*, <<http://www.ban.org/Library/TheDigitalDump.pdf>>, [diakses tanggal 12 Maret 2012].
- Environmental Performance Review of Japan*, <<http://www.oecd.org/dataoecd/0/17/2110905.pdf>>, [diakses pada 12 Mei 2012]
- Exporting Harm: The High-Tech Trashing of Asia*, <<http://www.ban.org/Ewaste/technotrashfinalcomp.pdf>>, [diakses tanggal 28 Mei 2012].
- Fumikazu Yoshida, *The Political Economy of Waste Management in Japan*, Economic Journal of Hokkaido University 1999. <[http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/30573/1/28\\_P1-27.pdf](http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/30573/1/28_P1-27.pdf)>, [diakses pada 09 Januari 2014]
- Greenpeace Blasts Japanese Gov't over Hazardous Waste Exports to Thailand*, <<http://www.greenpeace.org/asia/ph/News-stories/greenpeace-blasts-japanese-gov>>, [diakses tanggal 30 Mei 2012].
- Gross Domestic Product 2012*, <<http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf>>, [diakses pada 15 Oktober 2013].
- Haruka Araki, *The Causes of the Japanese Lost Decade: An Extension of Graduate Thesis*, <[http://daigakuin.soka.ac.jp/assets/files/pdf/major/kiyou/16\\_keizai3.pdf](http://daigakuin.soka.ac.jp/assets/files/pdf/major/kiyou/16_keizai3.pdf)>, [diakses pada 13 Desember 2013]
- Hirokazu Iwasaki. *Overcoming Pollution in Japan and the Lessons Learned*. <<http://www.wepa-db.net/pdf/0810forum/paper36.pdf>>, [diakses pada 09 Januari 2014]
- Hiroshi Takatsuki. *The Teshima Island industrial waste case and its process towards resolution*, <<http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd43/isla.pdf>>, [diakses pada 09 Januari 2014]
- Improving Enforcement Of Hazardous Waste Laws: A Regional Look At E-Waste Shipment Control In Asia*, <[Http://Inece.Org/Conference/9/Proceedings/58\\_Wendell.Pdf](http://Inece.Org/Conference/9/Proceedings/58_Wendell.Pdf)>, [diakses tanggal 1 Mei 2012].
- Jane Corwin, *Japan's Manufacturing Competitiveness Strategy: Challenges for Japan, Opportunities for the United States*, The U.S. Department of Commerce, International Trade Administration, 2009, <[http://www.trade.gov/mas/ian/build/groups/public/@tg\\_ian/documents/webcontent/tg\\_ian\\_002085.pdf](http://www.trade.gov/mas/ian/build/groups/public/@tg_ian/documents/webcontent/tg_ian_002085.pdf)>, [diakses pada 11 Januari 2014]
- Joan W. Kimani. *Hi-tech Yet Highly Toxic: Electronics And E-Waste*, <<http://www.ajol.info/index.php/jolte/article/viewFile/41771/37130>>, [diakses tanggal 20 Juni 2012].
- John Myslicki. *Basel Convention: From Cairo to Basel*. <<http://www.umweltbundesamt>.

- de/sites/default/files/medien/421/dokumente/myslicki\_from\_cairo\_to\_basel.pdf>, [diakses pada 1 April 2013]
- Jonathan Krueger, *The Basel Convention and the International Trade in Hazardous Wastes*, in Olav Schram Stokke and Øystein B. Thommessen (eds.), *Yearbook of International Co-operation on Environment and Development 2001/2002* (London: Earthscan Publications), 43–51.  
<[http://www.fni.no/ybiced/01\\_04\\_krueger.pdf](http://www.fni.no/ybiced/01_04_krueger.pdf)>, [diakses pada 12 April 2013]
- Kabashima Hiroshi. *Settlement In Pollution Cases: Contribution to the Dispute Resolution of the Fukushima Nuclear Power Plant's Melt Down*,  
<[http://www.law.tohoku.ac.jp/gcoe/wpcontent/uploads/2012/04/gemc\\_06\\_cate2\\_3.pdf](http://www.law.tohoku.ac.jp/gcoe/wpcontent/uploads/2012/04/gemc_06_cate2_3.pdf)>, [diakses pada 09 Januari 2014]
- Katahrina Kummer (1992). *The International Regulation of Transboundary Traffic in Hazardous Waste: the 1989 Basel Convention*, *International and Comparative Law Quarterly* 41.
- Kenichi Miyamoto, *The Damage by Asbestos and the Problems of Compensation/Relief in Japan*, *Policy Science Association Ritsumeikan University*, 2010,  
<[http://www.ps.ritsumei.ac.jp/creative/research\\_output/discussion\\_paper/discussion\\_paper016.pdf](http://www.ps.ritsumei.ac.jp/creative/research_output/discussion_paper/discussion_paper016.pdf)>, [diakses pada 11 Januari 2014]
- Mark Bradford. *The United States, China & the Basel Convention On The Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal*. Article 3. Issue 2. Volume 8, 2011. *Fordham Environmental Law Review*,  
<<http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1445&context=erl>>, [diakses tanggal 28 Mei 2012]
- METI, *White Paper in International Trade 2003*,  
<<http://www.meti.go.jp/english/report/downloadfiles/gIT0342e.pdf>>, [diakses pada 23 April 2013]
- Nanang Parmuji mugasejati. *Dimensi Politik Dalam Krisis Ekonomi Jepang*.  
<[junalsospol.fisipol.ugm.ac.id/index.php/jsp/article/view/121/118](http://junalsospol.fisipol.ugm.ac.id/index.php/jsp/article/view/121/118)>., [diakses pada 20 November 2013]
- Takeshi Yasuma, *Hazardous Waste Trade Behind Japan's ASEAN Policy*, *Citizens Against Chemicals Pollution (CACCP)*, Bangkok: 2009.  
<[http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/basel/CSF\\_AJCEPA/Japan%27s\\_policy\\_behind\\_AJCEPA.pdf](http://www.ne.jp/asahi/kagaku/pico/basel/CSF_AJCEPA/Japan%27s_policy_behind_AJCEPA.pdf)>
- The Basel Convention Ban Amendment*,  
<<http://www.speakhumanrights.org/downloads/02/The%20Basel%20Convention%20Ban%20Amendment.pdf>>, [diakses tanggal 16 Mei 2013].